Resiliensi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Menggagas Sistem Tangguh di Masa Depan

Nur Laila Abidah^{1*}; Achmad Fageh¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

e-mail korespondensi: nurlailaabidah@gmail.com

Copyright © 2025 The Authors

This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT

In the context of globalization and increasingly complex economic challenges, the resilience of the Islamic economy is one of the most important things. The purpose of this study is to determine the resilience of the Islamic economy in Indonesia and how this system can be adopted to create economic stability in the future. The method used is a qualitative approach using descriptive analysis. The findings in the study state that government policies, sharia regulations, financial inclusion and literacy regarding Islamic finance and economics have an important role in influencing the resilience of the Islamic economy in Indonesia. In addition, technology adoption and innovation were also identified as key factors in strengthening the Islamic economic system in the future. The implication of this research is the importance of strengthening the foundation of the Islamic economy through supportive policies, clear regulations and broader Islamic economic education. This research is also expected to be able to contribute to the development of a resilient and sustainable Islamic economic system in Indonesia as well as to serve as a basis for decision-making in designing economic policies to be more inclusive for sustainability in the future.

Keywords: *resilience; islamic economy; resilient system; future; indonesia*

ABSTRAK

Dalam konteks globalisasi dan tantangan ekonomi yang semakin kompleks, resiliensi ekonomi syariah merupakan salah satu hal yang cukup penting. Tujuan dalam penelitian ini guna mengetahui resiliensi ekonomi syariah di Indonesia dan bagaimana sistem ini dapat diadopsi untuk menciptakan kestabilan ekonomi di masa depan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Temuan dalam penelitian menyatakan bahwa kebijakan pemerintah, regulasi syariah, inklusi keuangan dan literasi mengenai keuangan maupun ekonomi syariah mempunyai peranan yang penting dalam mempengaruhi resiliensi ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Selain itu, adopsi teknologi dan inovasi juga diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam memperkuat sistem ekonomi syariah di masa depan. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya memperkuat pondasi ekonomi syariah melalui kebijakan yang mendukung, regulasi yang jelas serta pendidikan ekonomi syariah yang lebih luas. Pada penelitian ini juga diharapkan akan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan sistem ekonomi syariah yang tangguh serta berkelanjutan di Indonesia sekaligus dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam

merancang kebijakan ekonomi supaya menjadi lebih inklusif untuk keberlanjutan di masa yang akan datang.

Kata Kunci: *Resiliensi; ekonomi syariah; sistem tangguh; masa depan; indonesia*

A. PENDAHULUAN

Resiliensi ekonomi syariah telah menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks global maupun domestik, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Di Indonesia, sektor ekonomi syariah telah memainkan peran penting dalam membangun ketahanan ekonomi yang tangguh di masa depan. Dengan pertumbuhan yang pesat pada dekade terakhir ini, ekonomi syariah di negara Indonesia telah menunjukkan resiliensi yang kuat dalam menghadapi gejolak ekonomi global maupun lokal. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor ekonomi syariah di Indonesia. Menurut Laporan Tahunan otoritas jasa keuangan (OJK), bahwa mengenai total asset dari industri keuangan syariah di Indonesia telah mencapai 1.000 triliun rupiah lebih pada tahun 2020, menandai pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, jumlah dari lembaga keuangan syariah dan produk-produk keuangan syariah juga terus mengalami penambahan, menunjukkan minat yang meningkat dari masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Resiliensi ekonomi syariah di Indonesia juga tercermin dalam kemampuannya untuk bertahan dan bahkan tumbuh di tengah-tengah krisis ekonomi. Sebagai contoh, selama krisis global pada tahun 2008, sektor ekonomi syariah di Indonesia terbukti cukup tahan pada gejolak pasar dibanding sektor konvensional. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip ekonomi syariah yang didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi risiko, telah memberikan landasan yang kuat untuk membangun ketahanan ekonomi yang tangguh. Pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke-13 dalam Indeks Kesiapan Ekonomi Syariah Global (GIER) yang disusun oleh *International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)* dan *DinarStandard*. Ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

Salah satu aspek penting dari resiliensi ekonomi syariah adalah kemampuannya untuk menghadapi tantangan eksternal. Dalam konteks global, ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan ketahanan terhadap goncangan ekonomi global seperti krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 serta wabah virus Covid-19. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan, dapat memberikan landasan yang kuat untuk ketahanan ekonomi. Selain itu, ekonomi syariah juga telah memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi mikro dan menengah. Melalui lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti bank syariah dan koperasi syariah, masyarakat dapat mengakses pembiayaan sesuai prinsip syariah yang pada gilirannya dapat meningkatkan inklusi pada keuangan sekaligus ekonomi akan tumbuh menjadi lebih inklusif.

Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan, terdapat pula beberapa tantangan yang harus diatasi dalam rangka pemastian mengenai resiliensi ekonomi syariah di masa depan. Salah

satunya adalah perlunya peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan produk keuangan syariah, hal tersebut akan membantu masyarakat memanfaatkan potensi ekonomi syariah secara lebih efektif. Selain itu, pengembangan infrastruktur keuangan syariah juga menjadi kunci dalam memastikan resiliensi ekonomi syariah di masa depan. Pada tahun terakhir diketahui bahwa ekonomi syariah Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan positif. Namun, tantangan ekonomi global seperti krisis keuangan, perubahan iklim, dan pandemi telah membawa dampak yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ekonomi syariah di Indonesia telah menghadapi tantangan ini dan bagaimana hal tersebut dapat menjadi contoh bagi pengembangan sistem ekonomi yang tangguh di masa depan.

Data menunjukkan bahwa sektor ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan ketahanan yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi syariah terus meningkat, dan sektor ini telah terbukti menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia yang tangguh. Namun, masih terdapat potensi untuk meningkatkan resiliensi ekonomi syariah pada masa mendatang. Dalam menggagas sistem yang tangguh di masa depan, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi resiliensi ekonomi syariah. Hal ini termasuk kebijakan pemerintah, literasi keuangan syariah, infrastruktur keuangan syariah serta kerjasama antar lembaga keuangan syariah. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan resiliensi ekonomi syariah di masa depan. Selain itu, penting untuk memperkuat kerjasama diantara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan yang konvensional. Dengan meningkatkan kerjasama ini, kita dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh dan dapat menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Ini juga akan membantu memperkuat posisi ekonomi syariah di negara Indonesia supaya dapat menjadi salah satu kekuatan yang utama bagi perekonomian pada tingkat global. Maka dalam penelitian akan memberikan bahasan mengenai “Resiliensi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Menggagas Sistem Tangguh di Masa Depan”. Dan diharapkan dari adanya penelitian yang seperti ini, akan mampu memberi paling tidak sedikit banyaknya sebagai tambahan referensi untuk perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Resiliensi

Menurut Reivich & Shatte resiliensi yaitu sebuah kemampuan dalam mengatasi persoalan, adaptasi pada kejadian berat ataupun masalah-masalah yang ada di kehidupan manusia, mampu bertahan ketika menghadapi keadaan yang penuh dengan tekanan sekaligus mampu menghadapi kesengsaraan dan trauma dalam hidupnya. Sedangkan Grotberg berpendapat bahwa resiliensi yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang supaya dapat menghadapi sekaligus mengatasi dan menjadi lebih kuat pada saat dihadapkan dengan berbagai kesulitan yang datang. Gutman, Sameroff dan Cole berpendapat mengenai kondisi yang sulit yang akhirnya mampu memberikan sebuah kesuksesan, maka hal tersebut merupakan konsep dari resiliensi. Resiliensi ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat bertahan sekaligus beradaptasi pada

sesuatu yang salah dan tidak sesuai. Hal seperti itu dapat membantu seseorang mengatasi berbagai macam kesulitan yang datang di kehidupannya. Meningkatkan resiliensi akan memberikan kemampuan juga terhadap seseorang untuk dapat menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Resiliensi menjadi salah satu kunci sukses pada suatu pekerjaan sekaligus untuk mendapatkan rasa puas dalam hidup seseorang. Resiliensi mampu mempengaruhi Kesehatan fisik, mental serta kualitas hubungan. Akan tetapi, semua yang telah dinyatakan tadi adalah salah satu komponen yang mendasari kebahagiaan serta kesuksesan (Suryadi, 2018, 170-171).

Individu yang mempunyai resiliensi tinggi dapat mengatasi permasalahan dan kesulitan ataupun trauma yang sedang dihadapi. Maka dengan begitu mereka akan melihat sebuah kegagalan sebagai kesempatan supaya dapat lebih maju serta akan menarik banyak pelajaran dari adanya kegagalan tadi. Kegagalan bukan merupakan akhir dari sebuah kehidupan. Namun hal tersebut haruslah dijadikan sebagai batu loncatan untuk menjadikan dirinya lebih baik lagi dari sebelumnya. Kegagalan dapat dijadikan suatu kesuksesan, sedangkan ketidakberdayaan dapat dijadikan sebagai kekuatan. Seseorang yang mempunyai resiliensi akan lebih banyak mendapatkan dorongan untuk mengatasi berbagai keterbatasan dalam hidup. Dengan adanya keterbatasan itu dapat menjadikan manusia lebih tertantang dalam menghadapi, mempelajari, mengubah dan mengatasi suatu permasalahan menjadi lebih baik lagi. Hasil penelitian oleh Gutman, Sameroff dan Cole menemukan bahwasanya seorang individu yang pernah mengalami masa-masa sulit, maka akan lebih mampu termotivasi dalam mencapai tingkatan akademik yang lebih baik. Sebaliknya, pada individu yang resiliensi rendah akan lebih menganggap bahwa suatu permasalahan adalah beban bagi kehidupannya. Dan menjadikan hal tersebut sebagai ancaman sekaligus menjadikan dirinya menjadi seorang individu yang lebih cepat frustrasi dalam menghadapi suatu permasalahan kehidupan (Fonny, dkk, Mei 2006, 35).

Menurut Jew, Green dan Kroger, individu yang memiliki skor resiliensi tinggi cenderung menunjukkan kemampuan akademik yang lebih baik daripada individu yang memiliki skor resiliensi rendah. Grotberg mengatakan bahwa ada beberapa faktor spesifik dalam resiliensi, salah satunya adalah terkait dengan pencapaian akademik. Moss dan Laurent menyatakan bahwa performa akademik adalah hal penting dan merupakan indikasi keberhasilan di dunia nyata. Seseorang dengan tingkat ketangguhan yang tinggi akan melihat tugas-tugas pendidikan sebagai suatu tantangan yang harus mereka taklukkan demi meraih prestasi. Tantangan itu akan mendorong seseorang untuk memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Sementara individu yang memiliki tingkat resiliensi rendah, mereka lebih cenderung merasa frustrasi dengan cepat saat dihadapkan pada tugas-tugas pendidikan.

Resiliensi pada individu telah didefinisikan oleh Grotberg dalam Schoon tahun 2006 sebagai kemampuan manusia untuk menghadapi, mengatasi, dan beradaptasi dengan pengalaman traumatis yang dialami. Ketika seseorang yang memiliki ketahanan menghadapi berbagai gangguan dalam hidup, mereka akan mengatasi perasaan mereka dengan cara yang sehat. Mereka akan membiarkan diri mereka merasakan duka, marah, kehilangan, dan kebingungan saat mereka merasa terluka, tetapi mereka tidak akan membiarkan perasaan itu menjadi permanen. Resiliensi juga merujuk pada proses pengembangan kapasitas seseorang untuk bertahan dalam menghadapi

tantangan fisik, sosial, dan emosional. Beberapa dari individu yang memiliki ketangguhan tersebut tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu untuk berkembang. Mereka mengembangkan cara untuk bisa mengubah situasi stres menjadi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Maka, akhirnya mereka bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa resiliensi adalah kemampuan untuk tetap bertahan dan tidak putus asa di tengah berbagai peristiwa buruk atau musibah, serta mampu mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, yang kemudian akan memungkinkannya untuk bangkit kembali (Heriyanto, 2020, 31).

2. Sistem

Abdul Kadir menyatakan bahwa sistem adalah sebuah rangkaian elemen yang saling terkait atau terpadu dengan tujuan mencapai suatu tujuan. Menurut Sutabri, sistem adalah sekelompok unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terintegrasi. Menurut Sutarman, sistem adalah sebuah kumpulan elemen yang saling terhubung dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan utama melalui sebuah proses. Fatansyah mengungkapkan bahwa sebuah sistem adalah suatu susunan (keterpaduan) yang terdiri dari beberapa komponen yang berfungsi (dengan fungsi dan tugas khusus masing-masing) yang masih terhubung satu sama lain dan bersama-sama bertujuan untuk memenuhi proses tertentu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem terdiri dari sejumlah elemen, memiliki kumpulan unsur, dan komponen fungsional yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (BPAKHM Universitas Negeri Padang dalam bpakhm.unp.ac.id).

3. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam (syariah). Cakupannya meliputi semua sektor ekonomi yang ada, seperti keuangan dan sektor riil. Sistem dalam ekonomi syariah juga harus memberikan manfaat (masalah) yang merata dan berkelanjutan bagi setiap bagian perekonomian. Ekonomi syariah juga merujuk pada Laporan Ekonomi Islam Global 2013, yang merupakan serangkaian laporan global tentang kinerja ekonomi negara-negara Muslim di seluruh dunia. Menurut laporan itu, ekonomi Islam memiliki arti bahwa semua sektor inti dalam perekonomian beserta ekosistemnya juga dipengaruhi secara struktural oleh gaya hidup konsumen dan praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Definisi itu juga sesuai dengan yang diajukan oleh ekonom Frederic Pryor bahwa sistem ekonomi syariah merupakan konstruksi teoretis dari sistem ekonomi industri yang juga dijalankan sesuai ajaran agama Islam. Meskipun ekonomi syariah masih dianggap hanya sebatas konstruksi teori, Pryor menegaskan bahwa saat sistem ini dijalankan oleh umat Islam, hal tersebut sesuai dengan definisi yang ditawarkan oleh peneliti dan pemikir ekonomi syariah lainnya.

Timur Kuran menyatakan bahwa para pelaku ekonomi Islam membuat keputusan berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Menariknya bahwa ekonomi syariah ini dapat dijalankan bukan hanya oleh seorang Muslim, tetapi juga oleh siapa pun yang keputusannya dipandu oleh prinsip ekonomi yang berasal dari dua sumber ajaran Islam

tersebut. Umer Chapra juga setuju dengan hal tersebut. Menurutnya, sistem ekonomi syariah lebih memprioritaskan keadilan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual. Definisi sistem ekonomi syariah tersebut adalah universal dan konsisten dengan arah pembangunan nasional, dasar negara Pancasila, dan juga strategi pembangunan yang berkelanjutan, seperti halnya tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*). Maka dapat disimpulkan bahwa cakupan ekonomi syariah sangat besar. Jika aktivitas ekonomi didasarkan pada Al-Quran dan Sunah, serta dilakukan secara benar dan komprehensif oleh umat Islam, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai aktivitas ekonomi syariah. Aspeknya juga dapat dikembangkan dengan mencakup keuangan, filantropi, dan sektor riil secara luas. Ciri utama yang dimilikinya adalah bebas dari segala bentuk riba, ketidakpastian (*gharar*), dan perjudian (*maysir*).

Dengan kata lain, itu berarti bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang halal. Ruang lingkup pembahasan rencana induk dan peta jalan untuk pengembangan ekonomi syariah mencakup semua sektor dalam perekonomian yang dikategorikan sebagai halal dan harus sesuai dengan tujuan (*maqasid*) syariah. Fokus utama dalam penerapan pengembangan ekonomi syariah adalah pada sektor riil, terutama yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Secara khusus, yang dipilih adalah sektor produksi dan jasa. Namun, keutamaan diberikan kepada mereka yang telah menerapkan label halal sebagai cara membedakan produk mereka dari yang lain. Kategori halal juga tentunya memiliki cakupan yang sangat luas, hal ini karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekonomi syariah. Berdasarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal dalam Peraturan No. 33 Tahun 2014, disebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dikonfirmasi sebagai halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal merujuk kepada produk atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, kosmetik, obat, produk kimia, biologi, rekayasa genetika, dan berbagai barang lain yang bisa digunakan oleh masyarakat, dan telah disahkan sebagai halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kehalalan sebuah produk, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan, pendistribusian, penyimpanan, penjualan, hingga penyajian produk (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, 4-5).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif dan juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu suatu kegiatan dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penggunaan berbagai macam literatur yang ada seperti halnya berupa buku, kitab, catatan ataupun hasil dari penelitian yang terdahulu dan sumber-sumber lainnya yang sejenis yang dirasa masih relevan sebagai bahan rujukan. Penggunaan literturnya menggunakan berbagai buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal serta sumber berita yang sudah banyak beredar di berbagai media informasi yang sudah dapat diterima serta diakses dengan lebih mudah. Dilihat dari sifatnya yang telah disebutkan diawal juga, bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini tentunya akan melibatkan berbagai upaya yang terbilang penting dalam hal

pengumpulan data sekaligus analisis data yang ada secara induktif di mulai pada tema yang khusus sampai ke umum, kemudian melakukan penafsiran makna dari data tersebut. Pada kesempatan ini akan disampaikan mengenai penjelasan dan penggambaran dari Resiliensi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Menggagas Sistem Tangguh di Masa Depan. Pada penelitian ini menggunakan objek yaitu Resiliensi Ekonomi Syariah di Indonesia. Sehingga penelitian ini akan memberikan sebuah gambaran sedikit banyaknya mengenai Resiliensi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Menggagas Sistem Tangguh di Masa Depan. Berikut merupakan model resiliensi yang pada umumnya digunakan: (Gilbert & Ayyun, 2016, 3)

$$\text{Resiliensi (Re)} = \frac{t_i + F\Delta t_f + R\Delta t_r}{t_i + \Delta t_f + \Delta t_r}$$

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia

Prof. Dr. Muliaman Darmansyah Hadad, Komisararis Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), menyatakan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar di tengah tantangan ekonomi global. Dia menyatakan bahwa ada empat tantangan yang sedang dihadapi oleh perekonomian dunia saat ini. Ini mencakup ketidakpastian global, pemanasan global dan krisis iklim, digitalisasi, serta kerja sama global. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah ketidakpastian global yang disebabkan oleh berbagai isu, mulai dari konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, krisis kesehatan, hingga potensi perang. Ditegaskan kembali bahwa ada angin segar yang berasal dari dunia Islam dalam bentuk penerapan ekonomi syariah. Hal ini telah terbukti di banyak tempat dapat mendorong resiliensi yang luar biasa dan inklusi keuangan melalui dukungan digitalisasi. Ini dikatakan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang lesu. Di tengah ketidakpastian, perbankan Islam global berhasil mencapai rekor dalam pengelolaan asetnya dengan pertumbuhan yang cukup bagus sebesar 6,9 persen. Ternyata, Indonesia lebih baik dari itu, pertumbuhannya mencapai 15,9 persen.

Tantangan kedua adalah pemanasan global dan perubahan iklim. Diketahui bahwa abad ini telah mencatat rekor sebagai abad terpanas. Lebih dari 200 negara telah diminta untuk berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga tahun 2030, dengan tujuan menjaga kenaikan suhu global agar tidak melebihi 2 derajat. Komitmen ini telah disetujui dalam Konferensi Para Pihak (COP) ke-21, yang juga dikenal sebagai Perjanjian Paris. Protokol Kyoto tahun 1997 juga telah membahas mengenai pemanasan global, dan sudah cukup lama. Namun hingga saat ini, masalah tersebut masih belum terselesaikan dan tidak terlihat jelas. Terutama di masa pandemi, segala sesuatunya telah menjadi lebih sulit dari sebelumnya, terutama dalam memenuhi komitmen, pembiayaan, pengurangan emisi, dan hal lainnya.

Tantangan ketiga adalah digitalisasi yang memberikan banyak peluang. Namun, di sisi lain juga menimbulkan berbagai tantangan tersendiri. Beberapa tantangan di era digital mencakup pemisahan antara memiliki akses digital dan tidak memiliki akses digital, penggantian pekerjaan yang menyebabkan kehilangan beberapa pekerjaan, ketidakseimbangan keterampilan digital,

serangan siber, disrupsi industri, dan regulasi. Teknologi bisa dibidang sebagai pisau bermata dua, yang artinya dapat memberikan manfaat, tetapi jika digunakan oleh tangan yang salah, bisa menjadi sesuatu yang kontroversial (menyebabkan masalah).

Tantangan ekonomi keempat adalah kerja sama global. Penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antar negara, kurangnya kepercayaan dan transparansi, ketidak konsistenan dalam mengikuti perjanjian internasional, ketidakadilan dalam hubungan global, dan hal-hal sejenis lainnya. Dengan adanya tantangan tersebut, dikatakan bahwa terdapat juga peluang besar bagi ekonomi syariah untuk dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada. Ini dapat berasal dari tujuan-tujuan syariah, yang menyatakan bahwa Islam memiliki kerangka moral dan etika yang dapat menjadi panduan dalam mengatasi masalah-masalah global. Maqasid syariah adalah tujuan atau maksud yang merujuk pada prinsip dasar hukum Islam untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Dalam maqasid syariah, ada lima prinsip yang harus dijaga, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika ditanyakan mengapa maqasid syariah penting, maka jawabannya adalah bahwa maqasid syariah memberikan kerangka untuk menanggapi berbagai masalah, seperti masalah keadilan, seimbangannya hak individu dengan kebaikan bersama, perilaku etis, kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan, kerjasama internasional, promosi dialog, dan sikap saling menghormati (Muhtar, dalam uici.ac.id).

Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin diakui juga di kancah internasional. Selama masa pemulihan pasca pandemi, Indonesia tetap berhasil mempertahankan peringkat ketiga dalam *Islamic Finance Development Indicator* pada tahun 2022. Indonesia juga memiliki potensi untuk menjadi salah satu negara terbaik dalam hal pengelolaan ekonomi dan keuangan berbasis syariah. Dalam mengamati perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, pada Jumat, 30 Juni 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan laporan mengenai kemajuan keuangan syariah di Indonesia dengan tema "Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Syariah dan Digitalisasi untuk Menguatkan Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional". Tema LPKSI tahun 2022 menunjukkan komitmen kuat OJK untuk mendorong ketahanan dan kemajuan industri keuangan syariah di Indonesia selama masa pemulihan pasca pandemi Covid-19. Dalam pembuatan laporan tersebut, OJK terus berupaya untuk menjaga sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, untuk menyajikan gambaran industri keuangan syariah. Keadaan ekonomi mulai membaik seiring dengan aktivitas masyarakat yang kembali normal seperti biasa. Selama tahun 2022, ekonomi Indonesia juga terus menunjukkan ketahanan dengan adanya pemulihan ekonomi setelah pandemi. Pertumbuhan PDB Indonesia juga mencapai 5,3% pada tahun 2022. Kinerja ekspor yang positif di Indonesia juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Dari segi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non bank syariah, telah terbukti bahwa strategi adaptasinya sudah mampu membawa optimisme untuk melewati masa pandemi, sehingga menunjukkan resiliensinya. Pada tahun 2022, aset industri keuangan syariah telah mencapai sekitar Rp 2.375,84 triliun, mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang hanya sekitar Rp 2.050,44 triliun,

atau tumbuh sebesar 15,87%, lebih tinggi dari tahun 2021 yang hanya tumbuh sebesar 13,82% secara tahunan. Pasar modal syariah memiliki porsi terbesar dalam aset keuangan syariah, yaitu sebesar 60,08%, dan mengalami pertumbuhan di tahun 2022 sebesar 15,51%, lebih tinggi dari tahun 2021 yang hanya mencapai 14,83%. Perbankan syariah mengalami percepatan pangsa pasar sebesar 33,77%, pada tahun 2022 sebesar 15,63% dibanding tahun 2021 hanya mencapai 13,94%.

Berikutnya, aset keuangan syariah IKNB memiliki porsi sebesar 6,15% dari total keseluruhan dan mengalami pertumbuhan yang pesat sebesar 20,88% pada tahun 2022, dibandingkan dengan hanya 3,90% pada tahun 2021. Secara umum, arah pengembangan sektor keuangan syariah telah dimasukkan ke dalam beberapa *roadmap*. Sama halnya dengan *roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025, Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025, Pengembangan Industri BPR dan BPRS 2021-2025, dan Pasar Modal Syariah 2020-2024, dalam sektor pasar modal juga terdapat terjemahan yang lebih detail dari *master plan* sektor jasa keuangan Indonesia 2021-2025. OJK juga berharap bahwa laporan tersebut dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat secara umum. Diharapkan bahwa laporan ini juga dapat meningkatkan semangat kerjasama semua pihak terkait dalam mendorong pemberdayaan ekonomi syariah dan memperkuat keuangan syariah untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional (MES, dalam ekonomisyariah.org).

2. Resiliensi Ekonomi Syariah di Indonesia

Menurut M Anwar Bashori, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, ketahanan ekonomi syariah di Indonesia telah terbukti selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020, yang mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi. Ekonomi nasional mengalami penurunan di atas 2 persen, sementara Indonesia hanya mengalami penurunan sebesar 1,7 persen dan masih terdapat dua sektor yang mencatat pertumbuhan positif, yaitu pertanian dan makanan halal. Ketika berbicara tentang ekonomi syariah, maka keberanian justru tampak di negara Indonesia yang tercinta. Jadi, hal ini menunjukkan negara sebenarnya memiliki potensi dan sebenarnya Indonesia harus membuat ekonomi syariah sebagai penopang kegiatan ekonomi di Indonesia. Dua sektor yang menjadi prioritas dalam rantai nilai halal, atau yang dikenal dengan sebutan Rantai Nilai Halal (RNH), mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun 2020. Sektor pertanian dan makanan halal masing-masing tumbuh sebesar 1,85 persen dan 1,58 persen. Sementara itu, sektor pariwisata yang ramah bagi wisatawan Muslim atau PRM dan sektor mode busana Muslim masing-masing mengalami penurunan sebesar 12,53 persen dan 8,87 persen.

Meskipun demikian, pangsa HVC terhadap PDB telah meningkat sebesar 24,3 persen pada tahun 2016, 24,49 persen di tahun 2017, 24,61 persen di 2018, 24,77 persen di tahun 2019, dan 24,86 persen pada tahun 2020. Ketika kita membicarakan tentang strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, maka yang sudah tepat adalah orkestrasinya di mana Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bekerja bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dari atas ke bawah, dan juga industri yang sudah berjalan dari bawah ke atas. Namun kita tidak dapat menggunakan strategi yang berbeda-beda, baik dari segi keuangan

maupun ekonomi. Ketika membicarakan pengembangan ekonomi syariah, maka kedua belah pihak harus bekerja sama. Ekonomi dan keuangan harus berkembang bersama-sama, karena keuangan tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari ekonomi. Ekonomi syariah di Indonesia sedang berkembang pesat, namun sistem keuangan syariahnya masih belum mencapai tingkat optimal. Salah satu strategi adalah merger BSI dan juga mengenai wakaf, hal ini merupakan PR bersama sehingga nantinya bisa mengembangkan strategi yang menjadi pilar ekonomi dan keuangan untuk menciptakan ekosistem orkestrasi yang baik dalam mendukung pengembangan bersama (Yunianto, dalam antaranews.com).

Ekonomi dan keuangan syariah akan terus diusahakan untuk dikembangkan. Bukan hanya karena sistem ekonomi ini telah terbukti tangguh dalam beradaptasi, tetapi juga telah mendapatkan dukungan komitmen dari pihak pemerintah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa ketahanan ekonomi dan keuangan syariah selama pandemi telah terbukti cukup kokoh. Ini juga didukung oleh pilar ekonomi dan keuangan syariah yang sudah berjalan di jalur yang tepat dan terus berkembang. Faktor ini menjadi alasan yang membuat kita lebih optimis dalam menghadapi ancaman resesi global di tahun 2023. Wakil presiden telah mengucapkan hal tersebut dalam sambutannya setelah pelantikan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulawesi Selatan di Auditorium Al Jibra di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar pada Sabtu, 3 Desember 2022. Kemudian, dalam perjalanan kerja di Sulawesi Selatan, Wakil Presiden juga menghadiri pembukaan Muktamar XV Pondok Pesantren As'adiyah di Lapangan Merdeka, Sengkang, Kabupaten Wajo. Dia mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir, ekonomi Indonesia dan dunia sedang menghadapi tantangan yang berat. Setelah pulih dari pandemi, perekonomian harus menghadapi tensi geopolitik yang berdampak global. Tetapi kita juga harus bersyukur bahwa dengan adanya dukungan fundamental ekonomi yang kuat dan kebijakan yang tepat, perekonomian Indonesia diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,72 persen pada triwulan ketiga tahun 2022.

Wakil presiden juga menyatakan bahwa ketidakpastian masih akan ada saat menyambut tahun 2023, tetapi masih ada beberapa alasan untuk tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat. Pertama, pemulihan ekonomi sedang berjalan dengan baik. Indeks manufaktur terus mengalami ekspansi dan pertumbuhan ekspor, sementara surplus neraca perdagangan terus meningkat. Indonesia mendapat manfaat dari sektor utama komoditas seperti kelapa sawit, tambang, pertanian, dan sebagainya. Kedua, kepercayaan dunia terhadap Indonesia meningkat dan posisinya di panggung global semakin diakui. Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu "bintang terang di Asia" karena posisinya yang strategis serta sumber daya alam dan demografi yang berharga. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kekuatan ekonomi dan keuangan syariah selama pandemi terbukti cukup kuat karena ekonomi syariah juga didukung oleh empat pilar, yaitu pengembangan industri halal, industri keuangan, dana sosial syariah wakaf, zakat, infak, sedekah, serta pengembangan usaha dan bisnis syariah serta perkembangan para pengusaha syariah.

Ma'ruf menyatakan bahwa potensi ekonomi syariah di Indonesia memiliki peluang untuk ditingkatkan lebih lanjut. Dikarenakan landasan ekonomi syariah tidak hanya didasarkan pada

syariah saja, tetapi juga mendapat dukungan dan komitmen dari pemerintah. Dibuktikan bahwa sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi dual yang terdiri dari konvensional dan syariah. Sistem perbankan juga menganut sistem perbankan ganda, yaitu terdapat bank konvensional dan syariah. Sama halnya dengan asuransi, pasar modal, dan hal lainnya. Saat ini, pemerintah juga sedang berusaha mewujudkan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat bagi produsen halal terkemuka di dunia pada tahun 2024. Oleh karena itu, ekonomi syariah seharusnya memiliki dasar yang kuat secara syariah, serta peraturan dan undang-undang yang mendukungnya. Komitmen pemerintah untuk memajukan ekonomi syariah juga harus terlihat melalui pembentukan komite nasional ekonomi dan keuangan syariah di tingkat pusat yang dipimpin oleh Presiden RI. Wakil ketua dan ketua harian adalah Wakil Presiden RI, sementara Menteri Keuangan RI adalah sekretarisnya, dan para anggotanya terdiri dari semua menko dan menteri terkait lainnya.

Untuk memperkuat pengembangan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerah ini, telah dibentuk komite ekonomi dan keuangan syariah. Komite-komite ini sudah dibentuk di Riau, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan. Wakil presiden menyatakan bahwa pemerintah sedang berusaha mewujudkan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia pada tahun 2024. Ini juga merupakan bagian dari upaya dan visi besar menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Oleh karena itu, Wakil Presiden menyampaikan pesan agar sertifikasi halal juga didukung. Dalam hal ini, penting juga untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah, karena tingkat pemahaman tentang hal tersebut masih rendah, yaitu sekitar 16 persen. Wakil presiden menyatakan bahwa industri halal dan tren gaya hidup halal semakin populer baik di tingkat nasional maupun global. Di wilayah tersebut, industri halal juga terus berkembang. Mirip dengan yang telah dikembangkan di Sidoarjo, Jawa Timur, Batam, Kepulauan Riau, Bintan, Banten, dan tengah dipersiapkan juga di Riau serta saat ini menunggu untuk dikembangkan di wilayah Sulawesi selatan.

Agar dapat melanjutkan tren pertumbuhan yang positif, saat ini pemerintah harus berfokus pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan yang sangat tinggi, dan mengurangi ketimpangan wilayah dan pendapatan. Diperlukan untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan bagi ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Hilirisasi, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi digital, dan pengembangan ekonomi hijau juga telah menjadi sangat penting dalam mencapai masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Rektor UMI Basri Modding mengatakan bahwa universitas juga akan mendukung pengembangan ekonomi syariah. Karenanya, universitas juga membutuhkan arahan dari Wakil Presiden yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia mengenai bagaimana memperkuat kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, terkait dengan tata kelola praktik ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang positif. Selain itu, juga tentang bagaimana caranya untuk mendorong komitmen dari para pihak di Sulawesi Selatan agar daerah tersebut dapat menjadi salah satu pilar utama dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia (Arman, dkk, dalam kompas.id).

Perbankan syariah ini dianggap memiliki tingkat ketahanan yang cukup tinggi terhadap perubahan global, khususnya yang diproyeksikan akan terjadi pada tahun ini. Perkembangan di sektor perbankan syariah diprediksi akan melebihi rata-rata pertumbuhan perbankan nasional. Hery Gunadi, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), mengungkapkan bahwa sektor perbankan masih akan menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi tahun ini, terutama dalam segmen syariah. Perbankan syariah telah terbukti mampu mencatatkan kinerja positif, terutama di tengah tren suku bunga yang tinggi, transformasi digital, dan risiko perlambatan perekonomian global. Proyeksi pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2023 diperkirakan sekitar 8-10%, sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) diprediksi sekitar 7%-9%. Diperkirakan bahwa pertumbuhan perbankan syariah akan melebihi rata-rata perbankan nasional, berdasarkan diskusi yang telah dilakukan di *BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2023*. Tetapi tingkat penetrasi perbankan syariah di Indonesia masih dianggap rendah, yaitu kurang dari 8%. Angka tersebut juga jauh berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia yang sudah mencapai lebih dari 30%, Brunei Darussalam juga telah mencapai 50%, bahkan Uni Emirat Arab sudah mencapai lebih dari 60%.

Oleh karena itu, peluang untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia masih sangat besar, terutama di BSI. Ditambahkan dengan fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak. Menurut survei sebelumnya mengenai preferensi masyarakat Indonesia terhadap produk perbankan syariah, 21% responden menyatakan kecenderungan mereka terhadap produk syariah. Mereka juga menyatakan bahwa mereka cukup loyal terhadap produk dan layanan syariah yang tersedia. Dan orang-orang juga mengatakan bahwa produk layanan perbankan syariah kompetitif. Temuan ini mengindikasikan, BSI yakin bahwa mereka akan bisa mencatat pertumbuhan di masa depan. Walau diketahui bahwa tahun 2023 merupakan tahun yang cukup menantang karena adanya dinamika dan ketidakpastian global, seperti tingginya angka inflasi, resesi, dan ketidakstabilan harga komoditas energi. Komisaris Utama Bank Mandiri, M Chatib Basri, juga menyatakan bahwa kondisi ketidakpastian saat ini akan berdampak pada industri perbankan. Oleh karena itu, diharapkan perbankan untuk menjaga nilai biaya sumber dananya dan hal tersebut dapat dilakukan di perbankan syariah. Juga diprediksi bahwa keunggulan perbankan syariah disebabkan oleh dua alasan, yaitu struktur produk dan keyakinan agama yang memungkinkan adanya struktur biaya dana yang relatif murah.

Disamping itu, BSI juga dapat memanfaatkan potensi lain yaitu daerah pasar dengan jumlah populasi muslim Indonesia yang juga merupakan populasi terbesar. Hal ini bisa dijadikan peluang untuk meningkatkan penetrasi perbankan syariah di Indonesia yang masih rendah, yaitu hanya sekitar 6%. Tahun 2023 bukanlah tahun yang mudah, mengingat potensi daya beli dan konsumsi mengalami penurunan. Namun, jika dilihat dari segi pasar, maka segmen tersebut berada di sana. *Chairman* CT Corp, Chairul Tanjung, menyatakan bahwa sektor keuangan syariah di Indonesia masih belum berkembang sepesat negara-negara tetangga. Diharapkan bahwa dengan demikian, perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga dapat terus meningkat, bahkan hingga dikenal di seluruh dunia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk

muslim, sudah seharusnya memiliki bank syariah yang kuat dan besar. BSI sudah mulai menunjukkan jejak untuk menjadi salah satu bank syariah terbesar di Indonesia maupun dunia (Anam, dalam cnbcindonesia.com).

3. Resiliensi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Menggagas Sistem Tangguh di Masa Depan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, termasuk perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non bank (IKNB) syariah, telah menunjukkan kekuatan yang dapat mendukung dalam proses pemulihan ekonomi. Menurut LPKSI yang dirilis oleh OJK, pada tahun 2021, aset industri keuangan syariah sudah mencapai sekitar Rp. 2.050,44 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,82 persen *year on year* (yoy). Pertumbuhan aset industri pada perbankan syariah sebesar 13,94 persen (yoy) di tahun 2021. OJK terus mendorong penguatan posisi industri perbankan syariah di tengah persaingan dengan berbagai ketentuan akselerasi transformasi digital yang didukung sinergi perbankan, ungkap Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso pada Selasa, 26 April 2022. Terkait aset IKNB syariah, pertumbuhannya juga positif yaitu sebesar 3,90 persen (yoy). Di sisi lain, industri pasar modal syariah juga mengalami perkembangan positif dengan nilai kapitalisasi pasar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang jumlahnya mencapai 3.983,65 triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 19,10 persen (yoy) dibanding tahun 2021. Agar dapat meningkatkan akses keuangan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perbankan di sekitar pesantren, OJK terus mengembangkan lembaga pembiayaan mikro berbasis syariah yang disebut Bank Wakaf Mikro (BWM). Saat ini, sudah ada 62 BWM yang beroperasi di 20 provinsi di seluruh Indonesia.

Ketahanan dan kinerja positif dalam industri keuangan syariah harus terus dipertahankan dengan mengakselerasi program-program untuk mengembangkan aktivitas keuangan sosial syariah melalui sinergi, inovasi, dan kolaborasi dalam pengembangan ekosistem rantai nilai halal. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, OJK juga telah aktif berkolaborasi melalui berbagai program, salah satunya adalah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa terdapat banyak potensi di berbagai daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan memiliki peluang untuk dikembangkan melalui peran keuangan syariah berbasis industri halal, seperti yang terjadi di Sumatra Barat dan Aceh, khususnya dalam sektor pariwisata, kuliner, *fashion*, dan kerajinan tangan. Jika semua potensi tersebut dapat dikembangkan secara komprehensif dalam satu ekosistem terintegrasi dan berbasis digital dari awal hingga akhir dengan melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, maka diyakini bahwa ekosistem tersebut akan memiliki efek pengganda yang signifikan pada perekonomian (Miftahudin, dalam medcom.id).

Tabel dibawah ini akan menjelaskan mengenai sektor perbankan syariah di Indonesia pada saat menghadapi krisis (Alamsyah dan Puspaningtyas, dalam ekonomi.republika.co.id).

No	Sektor perbankan syariah di Indonesia tetap kuat pada saat menghadapi krisis
1.	Bank Syariah Indonesia: diperlihatkan dengan adanya portofolio bisnis dan kinerja bank syariah yang juga terlibat di pasar modal dan dikatakan cenderung stabil. Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menegaskan bahwa kinerja yang positif menunjukkan bahwa dasar dari bank syariah dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam pemulihan ekonomi nasional.
2.	Ketahanan dapat dilihat dari aset, pembiayaan, dan DPK perbankan syariah yang telah tumbuh di atas perbankan nasional. Catatan yang ada hingga bulan Maret 2021 menyatakan bahwa terdapat pertumbuhan aset dalam perbankan syariah sebesar 12,8 persen, yang lebih tinggi dari perbankan konvensional dan nasional.
3.	Selanjutnya, dalam sektor pasar modal, terlihat bahwa tren keuangan syariah cenderung stabil dan mengalami pertumbuhan. Penilaian tersebut ditengarai karena investor ritel percaya bahwa investasi dalam saham Syariah dan sukuk dianggap lebih aman dan stabil selama pandemi.
4.	Investor ritel juga mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan memberikan pertumbuhan yang signifikan. Terdapat peningkatan jumlah kepemilikan pada reksadana syariah dan sukuk korporasi juga. Ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah juga akan terus berkembang.
5.	Berdasarkan data yang telah dirilis oleh Bursa Efek Indonesia, Bank Syariah Indonesia adalah salah satu entitas besar yang tercatat di BEI dan juga salah satu emiten paling stabil. Selama enam bulan terakhir sejak BSI diluncurkan pada tanggal 1 Februari 2021, emiten dengan kode BRIS dinilai stabil, berada pada angka 2.350-2.190.

Jika tren positif tersebut tetap berlanjut, maka ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar saat pandemi berakhir. Jika hal tersebut tetap terjaga, maka setelah pandemi Covid-19 selesai, kita dapat melihat dominasi pasar modal syariah yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi positif yang lebih besar pada ekonomi Indonesia dan ekonomi syariah.

Performa saham BRIS selama sebulan terakhir telah meningkat sebanyak 20 persen, meskipun kondisi pasar sedang terganggu oleh pandemi Covid-19 sejak awal Juni 2021. Kenaikan positif yang dicapai oleh bank syariah di Indonesia disebabkan oleh kemampuan bank syariah di Indonesia dalam menciptakan layanan digital yang beragam, yang jelas akan lebih memudahkan masyarakat dan nasabah. Ini disebabkan produk-produk bank syariah di Indonesia dapat digunakan dalam sektor-sektor usaha mikro yang sangat penting bagi banyak orang. Oleh karena itu, sektor IT akan menjadi fokus, demikian pula dengan layanan kesehatan dan kegiatan sosial. *Over heat* dari dua layanan terakhir juga perlu diperhatikan karena akan ada batas atas dari kedua layanan tersebut. *Up rise* akan terjadi di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Tentang sektor-sektor yang akan pulih lebih awal, seperti perdagangan grosir dan eceran.

Kusman Yandi, Direktur *Wholesale Transactional Banking* BSI, menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan merupakan bukti dari komitmen BSI terhadap masyarakat Indonesia dalam menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang lebih

inklusif. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam bidang ekonomi perbankan berbasis syariah. Ini juga menunjukkan komitmen BSI dalam mendukung pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. Data juga menunjukkan bahwa pasar modal syariah telah menyumbang aset sebesar Rp. 1.077,62 triliun, Aset keuangan syariah di Indonesia pada saat itu telah mencapai Rp. 1.823,13 triliun dari total keseluruhan pada bulan Januari tahun 2021. Dan angka tersebut perlu ditingkatkan lagi seiring dengan bertambahnya jumlah investor milenial di Indonesia selama pandemi (Alamsyah dan Puspaningtyas, dalam ekonomi.republika.co.id).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri keuangan syariah di Indonesia masih mengalami pertumbuhan positif. Bahkan ketika menghadapi krisis dan ketidakpastian dalam ekonomi global. Industri keuangan syariah di Indonesia tetap menunjukkan keuletannya. Industri keuangan syariah di Indonesia terus berkembang positif dan selama pandemi diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi syariah telah terbukti positif. Hal ini disampaikan oleh Bambang Widjanarko, Deputy Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK, dalam acara *Sustainable State Owned Enterprise (SOE)* dan *Islamic Business Forum* tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Info Bank pada 27 September 2023. Persentase pangsa pasar industri perbankan di Indonesia yang sebesar 7,7% telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Tren pertumbuhan positif tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang transformasi ekosistem industri perbankan syariah nasional.

Sejak tahun 1992, Bank Muamalat memiliki banyak sejarah yang sangat panjang. Kemudian dari segi undang-undang baru pada tahun 1998 disebutkan syariah, dan undang-undang tentang syariah muncul kembali pada tahun 2008. Peningkatan pangsa pasar industri perbankan syariah nasional tersebut merupakan hasil dari berbagai segmen di industri perbankan syariah. Pertumbuhan tersebut bermula dari pertumbuhan organik di bank umum syariah (BUS), bank hasil konversi, dan juga *spin off*. Mengenai diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 yang mengatur dan mewajibkan *spin off* atau pemisahan unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah atau BUS, hal tersebut dianggap positif. Karena pertumbuhan industri perbankan syariah berasal dari segmen bank umum syariah (Irawati, dalam infobanknews.com).

E. KESIMPULAN

Resiliensi ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa sektor ekonomi syariah mempunyai ketahanan yang baik dalam menghadapi tantangan ekonomi. Faktor-faktor seperti diversifikasi produk dan jasa, inklusi keuangan dan regulasi yang mendukung telah memperkuat ekonomi syariah. Meskipun demikian, masih diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan resiliensi, seperti peningkatan literasi keuangan syariah dan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Dengan melakukan hal ini, ekonomi syariah di Indonesia dapat menjadi lebih tangguh di masa depan sekaligus dapat memberi suatu kontribusi yang besar pada perekonomian secara keseluruhan. Studi ini mengeksplorasi resiliensi ekonomi syariah di

Indonesia dan bagaimana sistem ini bisa menjadi tangguh di masa depan. Penelitian menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan bagaimana prinsip syariah dapat mendukung ketahanan ekonomi.

Hasilnya menunjukkan bahwa ekonomi syariah mempunyai potensi untuk bertahan dalam menghadapi guncangan ekonomi, namun masih perlu peningkatan dalam hal regulasi dan literasi keuangan syariah. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran ekonomi syariah dalam membangun sistem ekonomi yang tangguh di masa depan. Resiliensi ekonomi syariah di Indonesia penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan yang kemungkinan terjadi di masa depan. Peran lembaga keuangan syariah dan inklusi keuangan juga menjadi faktor penentu dalam memperkuat resiliensi ekonomi syariah. Dengan memahami dan mengoptimalkan hal tersebut, maka diharapkan ekonomi syariah di Indonesia dapat menjadi lebih tangguh di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Ichsan Emerald dan Lida Puspaningtyas, “Resilience saat Pandemi, Performa Bank Syariah tetap Stabil”, ekonomi.republika.co.id dalam, diakses pada 6 November 2023, Pukul 20.02 WIB.
- Anam, Khoirul, “Tetap Resilien, Perbankan Syariah Bakal Cerah Tahun ini”, cnbcindonesia.com dalam, diakses pada 5 November 2023, Pukul 21.12 WIB.
- Arman, Reni Sri Ayu, dkk, “Wakil presiden: Resiliensi Ekonomi Syariah Cukup Solid”, kompas.id dalam, diakses pada 5 November 2023, Pukul 21.00 WIB.
- BPAKHM Universitas Negeri Padang dalam, diakses pada 5 November 2023, Pukul 19.00 WIB.
- Fonny, dkk, “Resiliensi Dan Prestasi Akademik Pada Anak Tuna Rungu”, *Jurnal Provitae*, Volume 2, No. 1, Mei 2006, 35.
- Gilbert, Stanley dan Bilal M. Ayyub, “Model-model untuk Ekonomi Ketahanan”, *Jurnal ASCE ASME J Risk Uncertain Eng Syst A Civ Eng*, Volume 2, No. 4, Desember 2016, 3.
- Heriyanto, Muh, *Who are You? (I am a day dreamer & a night thinker)*, Moeh Media Digital, 2020.
- Irawati, “Diterpa Krisis hingga Ketidakpastian Global, OJK sebut Keuangan Syariah tetap Resilien”, infobanknews.com dalam, diakses pada 7 November 2023, Pukul 12.23 WIB.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia, 2018.
- MES, ekonomisyariah.org dalam, diakses pada 5 November 2023, Pukul 19.35 WIB.
- Miftahudin, Husen, “OJK: Resiliensi Ekonomi dan Keuangan Syariah RI Sukses Dorong Pemulihan”, medcom.id dalam, diakses pada 6 November 2023, Pukul 19.04 WIB.

Muhtar, “Muliaman: Ekonomi Syariah Punya Potensi jadi Solusi Ketidakpastian Ekonomi Global”, uici.ac.id dalam, diakses pada 5 November 2023, Pukul 19.32 WIB.

Suryadi, Denrich, *Melenting Menjadi Resilien*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

Yunianto, Faisal, “BI: Resiliensi Ekonomi Syariah Terbukti saat Pandemi”, antaranews.com dalam, diakses pada 5 November 2023, Pukul 20.23 WIB.

This page has been intentionally left blank.